DINAMIKA *FAKE NEWS* ATAU *HOAX* SEBAGAI SUMBER KONFLIK HORISONTAL PADA PILKADA PROPINSI DKI TAHUN 2017

DYNAMICS FAKE NEWS OR HOAX AS A SOURCE OF HORIZONTAL CONFLICT IN THE PROVINCIAL POVERTY OF DKI JAKARTA 2017

Tri Legionosuko[1] dan Setyo Harnowo[2]

Universitas Pertahanan

Abstrak -- Pada awal diselenggarakannya Pemilu dan Pilkada secara langsung, media iklanlah yang banyak dipilih para kandidat. Media iklan tersebut di antaranya media cetak, media elektronik, dan media luar ruang. Kemajuan teknologi komunikasi kemudian dimanfaatkan dalam kampanye Pilkada untuk mendapatkan simpati dari masyarakat. Perkembangan yang terjadi dalam Media sosial, sebagai bagian dari inovasi teknologi informasi, memberikan ruang bagi seseorang untuk menyuarakan pikirannya yang sebelumnya mungkin tidak pernah bisa terdengar. Facebook, Youtube, Blogspot, Google+, WhatsApp dan lain-lain tidak hanya bisa digunakan sebagai alat pemasaran, namun juga bisa digunakan sebagai alat kampanye politik dalam Pilkada. Penelitian ini menggunakan metode kulitatif, dengan pendekatan deskriptif, yaitu mengumpulkan data-data yang diperoleh dari hasil interprestasi di lapangan. Pada tahun 2017, agenda politik Indonesia adalah diselenggarakannya Pilkada serentak baik ditingkat Propinsi maupun di tingkat Kabupaten/Kota. Dalam penyelenggaraan Pilkada serentak tersebut terdapat wilayah yang menjadi pusat perhatian masyarakat Indonesia yaitu Pilkada Propinsi DKI Jakarta. Namun, masifnya penggunaan media sosial pada kampanye Pilgub DKI 2017, menimbulkan kegaduhan yang sulit dihindari di media sosial. Maraknya hoax atau berita bohong menjadi fenomena yang mewarnai Pilkada Jakarta 2017 sejak putaran pertama. Media sosial menjadi disfungsi dikarenakan berita dan pesan-pesannya menimbulkan kegaduhan dan mengancam stabilitas. Peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, dimana penelitian ini mengeksplor fenomena Dinamika Fake News dan Hoax Sebagai Sumber Potensi Konflik Pilkada Propinsi DKI Tahun 2017, selain itu penelitian ini juga bersifat induktif dan hasilnya lebih menekankan makna. Data yang terkumpul ialah melalui proses wawancara dengan atau opini dan observasi melalui media masa terkait dengan proses kampanye pada Pilkada DKI 2017. Selain itu data yang digunakan juga dari berbagai literatur. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan Teori dan Konsep seperti Teori Komunikasi Massa, Teori Konflik Sosial dan Konsep Keamanan Nasional. Penelitian ini menunjukan tiga hal yakni: Pertama, Menganalisis merebaknya berita palsu dan hoax dalam Pilkada DKI 2017; Kedua adalah Menganalisis berita palsu atau hoax dalam Pilkada DKI 2017, apakah dapat menggiring masyarakat pada tindakan yang menimbulkan konflik horisontal secara massif; dan ketiga Menganalisis sikap pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi berita palsu atau hoax pada Pilkada DKI 2017 agar tidak menggangu keamanan nasional.

Kata Kunci : Fake News, Hoax, Konflik Sosial, Pilkada DKI 2017

[1] Mayjen TNI Dr. Tri Legionosuko, S.I.P., M.A.P adalah Dekan Fakultas Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan.

[2] Prof. Dr. drg Setyo Harnowo, Sp.BM adalah dosen program studi Damai dan Resolusi Konflik Universitas Pertahanan.

Abstract -- At the beginning of direct election and elections, advertisement media are chosen by many candidates. Advertising media such as print media, electronic media, and outdoor media. The advancement of communication technology is then utilized in the Pilkada campaign to gain sympathy from the community. The development that takes place in Social media, as part of information technology innovation, provides a space for a person to voice his thoughts that previously may never be heard. Facebook, Youtube, Blogspot, Google+, WhatsApp and others can not only be used as a marketing tool, but can also be used as a political campaign tool in Pilkada. This research uses the method of leather, with descriptive approach, that is collecting data obtained from result of interpretation in field. In 2017, Indonesia's political agenda is the simultaneous regional elections at both Provincial and District / City levels. In the implementation of the local elections there is a region that became the center of attention of the people of Indonesia, namely the Regional Head Election DKI Jakarta. However, the massive use of social media in the Jakarta Pilgub campaign in 2017, caused an unavoidable commotion in social media. The rise of hoax or false news is a phenomenon that colored elections Jakarta 2017 since the first round. Social media becomes a dysfunction because of the news and its messages causing noise and threatening stability. Researchers use descriptive qualitative research method, where this research explores the phenomenon of Fake News and Hoax Dynamics as the Source of Potential Conflict of Regional Head Election of DKI Province in 2017, besides that this research is also inductive and the result is more emphasize the meaning. The data collected is through the process of interviewing with or opinion and observation through the media associated with the campaign process in elections DKI 2017. In addition, the data used also from various literature. Data analysis in this research is done by Theory and Concept like Mass Communication Theory, Social Conflict Theory and Concept of National Security. This study shows three things: First, Analyzing the outbreak of false news and hoax in elections DKI 2017; Second is Analyzing false or hoax news in the elections of DKI 2017, whether it can lead people to actions that cause horizontal conflict massively; and third Analyze the attitude of government and society in facing the false news or hoax in elections DKI 2017 so as not to interfere with national security.
Keywords: Fake News, Hoax, Social Conflict, Pilkada DKI 2017

Pendahuluan

Perkembangan teknologi komunikasi terus melaju pesat. Akses teknologi komunikasi semakin memudahkan masyarakat dalam bersosialisasi. Kemudahan-kemudahan tersebut ditawarkan melalui munculnya banyak media sosial yang dapat digunakan oleh semua orang untuk berinteraksi. Perkembangan media sosial sendiri bergerak sangat cepat. Bila dahulu kita hanya mengenal friendster, saat ini kita telah dimanja dengan adanya facebook, twitter, instagram, WhatsApp dan lain-lain yang semuanya berdampak Positif untuk menambah wawasan dan pengetahuan, menyebarkan nilai-nilai solidaritas, toleransi dan optimisme.

Media sosial menjadi ruang ekspresi baru bagi masyarakat dunia dalam beberapa tahun terakhir ini. Data pengguna internet terbesar berada di wilayah DKI Jakarta yaitu sebanyak 3.538.000 jiwa sedangkan pengguna internet paling sedikit berada di wilayah Sorong dengan jumlah pengguna internet sebanyak 28.000 jiwa (Ditjen PPI

Kemkoinfokom, 2013). Diposisi pertama hampir 95,75% pengguna memanfaatkan internet untuk surat elektronik, menggeser posisi akses layanan media sosial yang mencapai 61,23%. Pada peringkat selanjutnya pemanfaatan tertinggi internet adalah untuk mencari berita/informasi (78,49%), mencari barang/jasa (77,81%), informasi lembaga pemerintahan (65,07%), sosial media (61,23%) (BPJS, 2013). Beberapa contoh dapat disebutkan seperti kemenangan Barack Obama dalam kampanye politiknya yang melibatkan media-media sosial seperti Twitter, Facebook, Youtube, blogspot melalui internet telah menyedot perhatian masyarakat dan berhasil mengangkat citra positif Obama. Di Indonesia sendiri Jokowi merupakan contoh serupa keberhasilannya menyebarkan informasi untuk meletakkan pengaruh yang lebih kuat di masyarakat Jakarta sehingga dapat memenangkan pemilihan Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2012. Media sosial tersebut berperan dalam mendorong perubahan politik sebuah negara. fenomena "*The Arab Spring*" beberapa tahun lalu menjadi bukti bagaimana media sosial mampu membawa perubahan politik. Fenomena inilah yang disebut oleh Howard dan Hussain (2013) sebagai *fourth wave democracy*. Media sosial mampu menghadirkan suara-suara individu yang sebelumnya tidak pernah bisa didengar melalui pemberitaan media-media *mainstream*. Di Indonesia, kehadiran media sosial juga memberikan pengaruh terhadap perubahan politik, sosial, budaya dan ekonomi di Indonesia. Media sosial menggeser dan menembus batas dari pola relasi interaksi hirarkis menjadi egaliter, baik di ruang politik maupun budaya. Seorang warga negara biasa secara langsung dapat mengkritik dan berkomunikasi dengan Presidennya hanya cukup dengan mengirim mention ke akun Presiden di twitter. Pada tahun 2017, agenda politik Indonesia adalah diselenggarakannya Pilkada serentak baik ditingkat Propinsi maupun di tingkat Kabupaten/Kota. Dalam penyelenggaraan Pilkada serentak tersebut terdapat wilayah yang menjadi pusat perhatian masyarakat Indonesia yaitu Pilkada Propinsi DKI Jakarta. Pemilihan umum Gubernur DKI Jakarta 2017 (disingkat Pilgub Jakarta 2017 atau Pilgub DKI 2017) dilaksanakan pada 15 Februari dan 19 April 2017 untuk menentukan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2017–2022. Ini merupakan pemilihan kepala daerah ketiga bagi Jakarta yang dilakukan secara langsung menggunakan

sistem pencoblosan. Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mencalonkan diri sebagai petahana bersama dengan Djarot Saiful Hidayat. Selain itu, mantan perwira TNI Agus Harimurti Yudhoyono bersama dengan Sylviana Murni, serta akademisi Anies Baswedan juga mencalonkan diri bersama Sandiaga Uno.

Kenyataan yang harus diketahui dan dipahami dalam Pilgub DKI 2017, kehadiran atau digunakannya media sosial secara terbuka dalam kampanye oleh Partai politik pengusung, organisasi kemasyarakat, pelaku bisnis, elit politik maupun simpatisan membawa konsekuensi menjadikan media sosial hadir sebagai ruang pertarungan berbagai macam aktor dengan membawa berbagai kepentingan. Media sosial menjadi seperti "medan perang" yang di dalamnya meliputi seluruh elemen masyarakat yang tidak lagi menjadi penonton, tetapi memungkinkan mereka ikut berperang. Tim sukses pasangan Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni menyadari pentingnya media sosial saat ini dan untuk memudahkan kerja sang calon, tim berencana memaksimalkan seluruh potensi yang ada, termasuk kampanye lewat media sosial (Pratama dan Taylor,2016). Tim sukses pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno memilih media sosial sebagai wadah kampanye pada putaran kedua Pilkada DKI 2017. Langkah ini diambil menyusul adanya aturan Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta yang melarang penggunaan alat peraga kampanye (Purnama,2017). Pendukung terbesar Ahok itu ada di media sosial, bicara lewat media sosial, mereka generasi-generasi yang hidupnya di dunia digital, yang selama ini banyak diabaikan oleh partai (Franciska,2016).

Tabel 1.1 Jenis Hoax Pada Pilkada DKI 2017

Dari uraian dan data pada tabel 1.1, dapat disampaikan bahwa jenis hoax yang banyak digunakan adalah pada isu sosial politik 91,80% dan isu SARA 88,60% dan sisanya relatif dibawah 50%. Hal tersebut mengindikasikan bahwa berita palsu (hoax) dapat memicu konflik sosial di masyarakat. Isu politik menjadi pemicu maraknya konfrontasi di media sosial seperti hate speech, saling hujat, dan lain sebagainya di Tanah Air. Ekspresi politik, saling hujat, saling bela pilihan politik dan merendahkan pilihan lain yang awalnya di

dunia nyata, kini bergeser ke dunia maya. Tidak heran kemudian intensitas fake news dan atau berita-berita hoax di media sosial begitu viral di media sosial. Para aktor dan korban penyebar hoax tidak lagi tunggal, melainkan lebih kompleks. Aktor penyebar hoax pun tidak hanya disebarkan pelaku kriminal, banyak juga dilakukan oleh mereka yang sekadar iseng, menyerang bermuatan politik, menyuarakan hatinya, atau hanya sekedar mencari sensasi.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kulitatif, dengan pendekatan deskriptis dengan mengumpulkan data-data yang diperoleh dari hasil interprestasi di lapangan. Penelitian deskriptif kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan. Selain itu, Penelitian deskriptif tidak memberikan perlakuan, manipulasi atau pengubahan pada variabel-variabel yang diteliti, melainkan menggambarkan suatu kondisi yang apa adanya. Satu-satunya perlakuan yang diberikan hanyalah penelitian itu sendiri, yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Dalam penelitian ini sumber data utama didapat dari argumentasi para informan atau opini dan observasi melalui media masa terkait dengan proses kampanye pada Pilkada DKI 2017 dan sumber data kedua diperoleh melalui studi kepustakaan. Dalam menganalisis data, peneliti peneliti menggunakan tiga langkah analisis data, yaitu (1) pengeditan data, setelah data terkumpul dilakukan mengecekan kembali, (2) pengkodean data, Melakukan penomoran atau kode lain terhadap data yang sudah diedit, untuk dikelompokan berdasarkan kategori, dan (3) menguji keabsahan data, peneliti menggunakan cara trianggulasi data, yaitu dengan mencari data dan informasi yang sama kepada subyeknya.

Hasil Penelitian

Persaingan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2017 melibatkan perhatian khalayak, walaupun Pilkada di daerah lainpun diselenggarakan tetapi atmosfirnya tidak terlalu mempengaruhi banyak perhatian dari masyarakat Indonesia. Mantan Pangkostrad Mayjen (Purn) Asril Tanjung, berpendapat bahwa Pilgub DKI Jakarta bak Pemilihan Presiden (Pilpres). Hal ini wajar terjadi karena Pilgub DKI Jakarta

merupakan wajah demokrasi yang ada di Indonesia (merdeka.com, 13/02/2017). The Strait Times, media asal Singapura bahkan membuat tulisan mengenai pelaksanaan Pilgub di DKI, yang juga sangat disorot di seluruh dunia. Termasuk para kontestan yang ikut di dalamnya, mulai dari pasangan Basuki-Djarot, Agus-Sylvi dan Anies-Sandiaga. "Jakarta bukan sekadar ibu kota administratif bagi Indonesia, tapi di sana juga terdapat jantung dan jiwa perpolitikan di Indonesia" (merdeka.com, 14/02/2017). Beberapa pengamat menilai, proses demokrasi yang terjadi dalam pemilihan kepala daerah DKI Jakarta 2017 memiliki posisi yang strategis, bahkan menjadi cermin peta kekuatan Parpol sebelum bertarung dalam Pilpres 2019 mendatang.

Dalam konteks Pilkada DKI 2017, kemampuan media sosial sebagai sarana dalam komunikasi massa, tak dapat dipungkiri menjadi salah satu perhatian dalam strategi politik. Beberapa kandidat sudah memberi perhatian terhadap media sosial. Hanya saja, penggunaan media sosial apakah dapat melahirkan dinamika politik lokal yang lebih demokratis, bertanggung jawab, partisipasif dan transparan sesuai dengan nilai nilai politik lokal yang tumbuh dan berkembang di daerah. Media sosial sebagai ruang publik virtual terefleksikan pada proses pilkada DKI Jakarta. Selama berlangsungnya proses Pilkada, warga ruang publik virtual seperti facebook dan twitter sangat aktif membahas Pilkada. Media sosial dalam hal ini telah mendorong adanya komunitas virtual di mana anggotanya dapat berdiskusi tentang isu publik, termasuk Pilkada dan kandidat, secara rasional. Para pengguna media sosial juga tak hanya kalangan kelas menengah ke atas. Kalangan menengah ke bawah juga telah menggunakan media sosial. Pengguna media sosial itu sendiri sudah melebar dengan adanya smartphone dengan harga terjangkau. Menurut Cangara (2016:338-339), di Amerika media massa menjadi sumber utama informasi politik. Jika pemilih mengalami kesulitan bagaimana cara memilih dan siapa akan dipilih, mereka akan kembali kepada media. "*Mass media as the primary source of political information*." (Dominick,1972, Mansfield and Weaver,1982).

Pemilih umumnya mengaku lebih banyak tahu tentang calon yang mereka idolakan melalui media. Melalui media orang dapat menyaksikan dan mengikuti aktivitas politik seperti kampanye, konferensi pers, debat kandidat dan lainnya. Media sosial diakui memiliki kemampuan untuk membuat penampilan

seorang kandidat lebih menarik dan menyakinkan, dengan teknologi yang canggih, politisi yang tampak kurus dalam foto bisa di *make over* jadi gemuk dan berisi, pakai peci dan sebagainya. Rekayasa seperti ini menurut Jean Baudrillad sebagaimana dikutip dalam Cangara (2016:339), disebutnya dengan istilah *simulacra*, yaitu kemasan yang tidak lagi memiliki keaslian, melainkan sesuatu yang lebih nyata daripada kenyataan itu sendiri. Sementara politisi juga kadang tidak menyadari diliput oleh media untuk membuat peristiwa palsu sebagai bahan berita oleh media.

Penggunaan media sosial dalam Pilkada DKI 2017 tidak luput dari rekayasa atau simulacra sebagaimana disampaikan oleh Baudrillad, walaupun diantara Parpol pengusung pada prinsipnya, selalu menyerukan untuk berpolitik secara sehat, menekankan tak melakukan kampanye hitam. Namun pada kenyataannya, indikasi kampanye hitam itu masih saja terjadi. Informasi-informasi hoax, berupa berita-berita menyesatkan, foto editan maupun video palsu beredar di dunia maya. Anggota Komisi I DPR Sukamta menilai munculnya fenomena berita bohong atau hoax bermula dari keisengan beberapa netizen, sebutan untuk pengguna media sosial, kemudian memuncak pada Pemilihan Kepala Daerah. Saat itu banyak menggunakan media sosial untuk berkampanye. Bahkan informasi hoax dibuat dengan sengaja oleh pihak tertentu. Ada kandidat yang membentuk tim khusus untuk mengelola, juga menyebarkan informasi di jagat maya. Semacam *Cyber Army*, untuk memproduksi bahan-bahan informasi, yang salah satunya hoax (suara.com, 07/01/2017). Tren penyebaran berita palsu (hoax) melalui dunia maya meningkat dan tidak akan surut setelah momentum Pilkada DKI 2017, karena efektif digunakan untuk menghantam berbagai kepentingan, termasuk kinerja pemerintahan (Niken Widiastuti, W/30/07/2017). Hoax bisa dikemas dengan cara yang sangat halus, disertai data yang seolah-olah benar. Sehingga pembaca agak sulit mengetahuinya. Berita hoax ini memang didesain sesuain dengan kebutuhan kelompok tertentu dan mengikuti isu-isu yang sedang berkembang, sehingga publik terlena dengan perkembangan isu seolah olah berita itu benar (Solih,W/03/08/2017). Dalam wawancara yang dilakukan oleh Madina Online dengan anggota Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) periode 2015-2018, Hikmat Darmawan terkait maraknya hoax dan ujaran kebencian dalam menjelang

Pilkada DKI 2017, menyampaikan bahwa, "Sekarang hoax dan kebencian sudah menjadi industri.

Peristiwa apa pun bisa dieksploitasi, bukan hanya untuk kepentingan politik, tapi juga untuk kepentingan ekonomi. Untuk kepentingan ekonomi, misalnya, si produsen berita hoax itu mendapat keuntungan pribadi dengan banyaknya pseudo berita yang di-share. Atau si produsen pseudo berita itu adalah orang yang dibayar untuk membuat situasi sosial menjadi resah. Itu kan salah satu cara gampang mencari duit sekarang." (mediaonline,06/01/2017). Masuknya kepentingan politik di dalam media, membuat berita-berita di media mainstream memiliki berbagai versi tentang satu peristiwa. Misalnya satu media mengatakan ekonomi Indonesia membaik, sementara media lain mengatakan ekonomi Indonesia terpuruk. Meskipun wartawan dari kedua media itu melakukan peliputan peristiwa dan fakta yang serupa. Pemberitaan yang berbeda-beda, dan cenderung mengikuti selera dan pesanan pemiliknya, membuat tingkat kepercayaan masyarakat terhadap media-median mainstream mengalami penurunan. Kondisi ini mendorong masyrakat mencari berita alternative yang disedia sumber lain. Namun sayangnya kebanyak sumber tersebut tidak jelas asal-usulnya. Turunnya tingkat kepercayaan terhadap media mainstream dan keinginan masyarakat mencari berita-berita alternative, dimanfaatkan oleh segelintir pihak dengan membuat berita palsu (hoax) untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dari berita yang disebarkannya.

Modus para pembuat berita hoax yaitu mengambil berita dari media lain (umumnya media-media mainstream), kemudian mengubah judul dan isinya, dan disebarkan ke grup-grup pertemanan di media social (Facebook, twitter, whatsapp, path, dll), lalu menjadi viral di media sosial. Dengan maraknya berita palsu, seseorang menjadi semakin hati-hati dalam menyikapi suatu informasi. Dengan demikian penyebaran berita hoax sangat berpengaruh pada sikap seseorang. Demikian juga dengan pengetahuan, semakin banyak berita hoax akan memperluas pengetahuan seseorang terutama tentang informasi yang belum tentu benar. Artinya seseorang menjadi memiliki pengetahuan baru tentang lingkungan sekitarnya, namun mereka harus mengecek ulang kebenaran itu. (Eko, W/08/07/2017). Luasnya pengetahuan yang mereka dapat dari berbagai informasi yang ditampilkan

media sosial harus lebih disikapi dengan sikap dan pengetahuan yang dewasa pula (khususnya bagi mereka yang awam).

Hal ini merupakan upaya agar masyarakat tidak memiliki pandangan yang negatif atau positif terhadap informasi yang diterbitkan melalui berbagai media sosial tanpa mencari kebenaran dan keabsahannya terlebih dahulu guna menghindarkan konflik sosial secara masif seperti yang dirasakan pada Pilkada DKI 2017. Pemertintah Indonesia menyadari bahwa pengaruh globalisasi dan perkembangan teknologi telekomunikasi yang sangat cepat telah mengakibatkan perubahan yang mendasar dalam penyelenggaraan dan cara pandang terhadap telekomunikasi. Tinjauan sosiologis mengatakan bahwa masyarakat gemar melahap berbagai berita palsu. Kegemaran ini terdorong karena kemajuan teknologi informasi yang merubah kultur kebiasaan masyarakat untuk mencari berita. Keterbatasan Undang-Undang Telekomunikasi dalam mengatur penggunaan teknologi informasi, akhirnya membuat pemerintah Indonesia mengatur Undang-undang ITE karena perlunya batasan dalam menggunakan teknologi informasi. Undang-Undang ITE sendiri memiliki irisan dari berbagai hukum. Diantaranya, seperti peneliti gambarkan dalam gambar berikut ini:

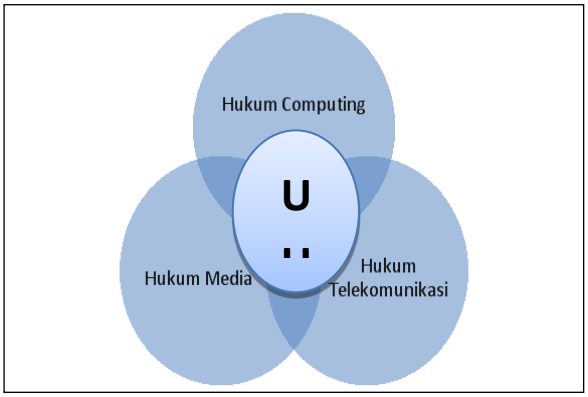

Undang-Undang ITE masih memiliki keterbatasan undang-undang ini hanya sebagian yang efektif dalam prakteknya karena kurang kuatnya hukum terhadap instansi pemerintah, korporasi dan sebagainya. Ada bermacam-macamnya peraturan perundangan di Indonesia dimana undang-undang yang satu saling bertentangan. Sehingga masyarakat merasa bebas dan berpikir bahwa tak ada sanksi dalam menyebarkan informasi yang belum tentu bisa dipertanggungjawabkan. Pada dasarnya pemerintah sudah membuat Undang-undang ITE (UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 28 ayat (2)). Tidak kuatnya undang-undang ini menggerakkan DPR untuk selalu merevisi undang-undang tersebut karena telah banyak menelan banyak korban termasuk yang dirasakan pada Pilkada DKI 2017. Bukti itu terlihat dari berbagai pihak yang

diadukan dari beragam kalangan. Artis, aktivis sosial, pegawai negeri sipil, ibu rumah tangga, motivator, mahasiswa, advokat, budayawan, sosiolog, karyawan swasta, politisi, penulis, sastrawan, perawat, wartawan, ustad, sampai tukang sate (Junianto, Regional Coordinator Safenet).

Pemilihan umum daerah hal ini selalu mejadi senjata politik untuk membungkam masyarakat yang kritis terhadap rekam jejak para calon pasangan yang maju dalam Pilkada DKI 2017. Akan tetapi, pasal karet dari Undang-Undang ITE memberikan dilema tersendiri bagi masyarakat. Sisi lain masyarakat tidak mampu memantau dengan baik dan terbatasi untuk andil kritis dalam setiap pemilu yang berlangsung. Kekhawatiran terbesar yang mengharuskan pemerintah mengambil sikap dalam hal ini adalah DPR mencoba mencari kebijakan yang pas dan baik dengan selalu merivisi Undang-Undang ITE agar membatasi dan menahan maraknya berita palsu atau hoax yang muncul. Kasus-kasus ini terekam dari persentase pelanggaran ITE pada media sosial dalam pencemaran nama baik. Sisanya, penodaan sebanyak 5%, ancaman sebanyak 1%, selain itu ada pula 5 kasus somasi dan 1 kasus pornografi. Persentase itu memperkuat peneliti bahwa sikap pemerintah dan masyarakat sangat berperan besar dalam kasus berita palsu atau hoax.

Masyarakat sebagai aktor utama dalam pembuat berita dan penikmat berita harus lebih dewasa dalam membuat dan menikmati segala berita yang muncul. Hal ini agar kembali sehat ilmu-ilmu pengetahuan yang masyarakat serap dari berbagai berita. Sehingga tidak ada lagi pergeseran dan pengelompokkan masyarakat akibat berita palsu yang beredar. Pengelompokkan ini juga dirasakan saat Pilkada DKI 2017 berlangsung, banyak berita palsu beredar yang menjelekkan berbagai Paslon yang akan dipilih. Berita Palsu ini membuat seolah abu bagi masyarakat atas Paslon Pilkada DKI 2017, karena masing-masing Paslon terpampang jelas keburukannya akibat berita palsu yang beredar yang tidak bias dipertanggung jawabkan kebenarannya.

Pemerintah dan masyarakat belum menyikapi betul bahwa internet kini telah menjadi sumber misinformasi termasuk berita palsu atau hoax. Pemerintah adalah merupakan bagian dari masyarakat sehingga mereka juga termasuk yang menggunakan internet atau media sosial, menurut darajad

terdapat dua kelompok masyarakat yang kerap memproduksi isu hoax. Pertama, mereka yang euforia terhadap teknologi baru. Kedua, mereka yang well educated, mendapat pendidikan dimana mereka sengaja memproduksi isu hoax tersebut. Maka, berita palsu atau hoax harus diperangi oleh seluruh masyarakat di Negara ini, kecendrungan orang menjadikan internet sebagai jendela informasi dimanfaatkan oleh oknum pada momen tertentu. Khususnya, pada Pilkada DKI 2017 internet bukan lagi hanya sekedar teknologi informasi untuk komunikasi melainkan media ini tidak jarang dan dimanfaatkan sebagai senjata kampanye.

Pasal 69 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 telah menyebutkan dengan jelas larangan dalam kampanye seperti menghasut, memfitnah, mengadu domba partai politik, perseorangan dan atau kelompok masyarakat. Regulasi belum menjadikan kelompok pembuat hoax takut dan khawatir, karena setiap informasi mereka kemas dengan baik seolah tidak terjadi suatu rekayasa informasi. Maraknya penggunaan internet memberikan kesulitan untuk mencari setiap pelaku pembuat hoax. Kasus ini terasa abu internet tidak lagi memberikan batasan berapa banyak email yang mereka miliki dan ini menjadikan potensi positif dan negatif, bergantung siapa yang menggunakan dan dipergunakan untuk apa. Sehingga, dengan email mereka mampu mengakses apapun dan untuk membuat apapun, termasuk berita hoax.

Fungsi komunikasi massa secara umum dapat dikatakan sebagai informasi, pendidikan dan hiburan. Dimaksudkan fungsi komunikasi ini, komunikasi massa dapat menyediakan informasi tentang peristiwa yang terdapt di dalam masyarakat, baik nasional, maupun internasional. Masyarakat dapat belajar mengenai seluk beluk politik lewat media massa, serta aktivitas – aktivitas yang berhubungan dengan politik, contoh : pada saat menjelang pemilu, media massa berfungsi sebagai sarana pembelajaran kepada masyarakat tentang cara memilih, menyoblos, atau mengenal kandidat-kandidat yang ikut dalam ajang pemilihan umum tersebut. Fungsi mendidik dalam komunikasi massa merupakan fungsi yang dilakukan komunikasi massa dalam memberikan pendidikan kepada masyarakat untuk berpikir kritis dan memiliki pengetahuan yang luas dalam bidang ekonomi, politik, hukum, sosial budaya, termasuk pembinaan moral dan pendidikan budi pekerti. Dalam

menghibur komunikasi massa dimaksudkan bahwa media massa menyajikan program hiburan bagi masyarakat terutama untuk relaksasi, pengalihan perhatian, dan meredakan ketegangan sosial. Kenyataannya fungsi umum itu sudah tidak lagi digunakan dengan baik oleh masing-masing yang memliki kepentingan dalam penyebaran kominikasi massa tersebut. Salah satu fungsi informasi yang dijadikan masyarakat sebagai bahan relaksasi sudah tidak lagi murni berisi kebenaran berdasarkan fakta. Program yang dianggap sebagi penghibur dan salah satu jendela informasi yang baik sudah tidak memberikan fungsi baik, informasi yang disajikan berbanding lurus dengan maraknya hoax berisikan tentang pengalihan perhatian, memicu konflik horisontal, dan hal yang sangat penting adalah lemahnya regulasi untuk memerangi hoax.

Dalam kondisi yang semarak akan informasi media sosial pada Pilkada DKI 2017 ternyata banyak kandidat yang menggunakan media baru sebagai ajang kampanye. Media baru memberi ruang yang lebih luas dan terbuka bagi kandidat untuk mengenalkan dan mencitratakan diri, sekaligus berinteraksi dengan konstituennya. Media baru memperoleh begitu besar perhatian karena berbagai kelebihan yang dimiliki, seperti penyebaran informasi dari segi waktu yang relatif cepat; dapat bersifat audio visual sehingga dapat mengemas pesan-pesan politik dengan lebih menarik; hingga manfaat dalam efisiensi dan efektivitas karena media baru dapat diakses dari mana saja dan kapan saja. Efektifitas penggunaan media sosial terletak pada penyampaian pesan-pesan politik dan program yang ingin disampaikan oleh suatu parpol tanpa harus terus menerus menghadiri tempat-tempat kampanye maupun menyaksikan tayangan-tayangan televisi dan mendengarkan radio yang telah terjadwal. Selain itu, sebagian besar pemilih pemula merupakan pengguna aktif internet sehingga melalui media sosial maka berbagai informasi akan mudah diperoleh dan dikonsumsi kapan saja. Oleh karena itu, media sosial berkembang sebagai alat untuk berkampanye dan lebih efektif.

Hasil yang telah dilakukan oleh peneliti menempatkan sosial politik (Pilkada, Pemerintah) merupakan sebuah isu terbanyak yang diterima sebesar 91,80% dalam bentuk hoax. Hal ini membuktikan bahwa berita palsu atau hoax yang diterima selalu berupa berita

palsu mengenai sosial dan politik mengungguli isu SARA, Kesehatan, Makanan dan Minuman, Penipuan, Keuangan, IPTEK, Berita duka, Candaan, Bencana Alam, dan Lalu lintas. Hoax dalam bentuk sosial dan politik secara terus menerus merebak saat pesta demokrasi khususnya Pilkada DKI 2017, dan ketika hoax dalam berita politik maka akan berpotensi besar dalam menimbulkan konflik sosial. Hoax yang diterima mengenai isu-isu apapun diterima setiap hari, dan penyebaran hoax dilakukan karena mampu mempengaruhi opini publik. Alasan itulah yang menjadikan setiap pasangan calon Pilkada menggunakan berita palsu atau hoax sebagai senjata untuk menjatuhkan dan menjelekkan lawan pasangan calon lain. Upaya ini dilakukan agar masyarakat terpengaruhi opininya sehingga berfikir ulang untuk memilih pasangan calon yang telah dipengaruhi ekseptabilitasnya dan elektabilitasnya.

Selain hoax sebagai fungsi yang mampu mempengaruhi opini publik, hoax juga merupakan suatu media baru yang sebagian masyarakat menyukainya, fungsi lain juga bahwa hoax secara terus menerus merebak adalah karena regulasi yang dibuat belum terlalu kuat, pasal yang dibuat acap kali disebut sebagai pasal karet. Sehingga dari berbagai fungsi dari penyebaran berita palsu atau hoax, hoax telah mampu dijadikan sebagi industri atau lahan untuk berbisnis. Dalam kehidupan bermasyarakat, masyarakat memiliki daya pemersatu (sentripetal), di antaranya solidaritas dan toleransi, di samping daya pemecah (sentrifugal) yang dapat menjadi pemicu terjadinya konflik sosial. Daya pemecah ini seringkali muncul dalam bentuk SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan), sehingga konflik sosial muncul secara kentara. Dalam kehidupan bermasyarakat yang terdiri dari beragam agama yang dianut warganya merupakan sumber konflik sosial yang bersifat laten. Konflik sosial yang disebabkan oleh perbedaan agama ini telah terjadi di Indonesia dengan menimbulkan kerugian, baik yang bersifat material maupun korban jiwa sehingga mengancam integritas kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada Pilkada DKI Jakarta 2017 ini pengaruh kampanye di media sosial sangat besar dirasakan, bahkan masyarakat diluar wilayah DKI Jakarta ikut turun tangan menanggapi berbagai isu yang berkembang mengenai ketiga pasang Cagub dan Cawagub.

Media sosial turut serta menampilkan berbagai informasi

mengenai kebaikan serta kelebihan dari ketiga pasang calon dan tidak jarang terdapat media sosial yang memberikan isu miring yang berujung pada banyaknya opini publik yang bermunculan. Masyarakat DKI Jakarta harus cerdas dalam menanggapi berbagai isu tersebut, sehingga mereka mampu menentukan pilihan mereka sendiri tanpa intervensi dari media sosial maupun opini publik yang berkembang. Yang harus mereka sadari adalah media belum sepenuhnya netral dalam mengkampanyekan calon-calonnya, terlepas dari elit politik yang ikut mewarnai berbagai industri media sosial yang ada.

Optimisme pada media sosial yang dilihatnya sebagai ruang publik virtual terefleksikan pada proses Pilkada DKI 2017 Jakarta. Selama berlangsungnya proses Pilkada, warga ruang publik virtual seperti FB dan Twitter sangat aktif membahas Pilkada. Media sosial dalam hal ini telah mendorong adanya komunitas virtual di mana anggotanya dapat berdiskusi tentang isu publik, termasuk pilkada dan kandidat, secara rasional. Apalagi saat ini, para pengguna media sosial juga tak hanya kalangan kelas menengah ke atas. Kalangan menengah ke bawah juga telah mulai menggunakan media sosial. Pengguna media sosial itu sendiri sudah melebar dengan adanya smartphone dengan harga terjangkau. Pulsa unlimited juga turut meningkatkan penggunaannya. Berangkat dari hal ini, timbullah pemikiran bahwa media sosial dapat menjadi senjata baru dalam mobilisasi politik, yang dipengaruhi adalah opini publik. Hal ini pun termasuk di dalamanya tentang kemampuan media sosial itu untuk dapat mengubah preferensi pemilih atas kandidat tertentu.

Media sosial ini mampu meningkatkan partisipasi masyarakat terkait dengan isu-isu publik. Pengguna media sosial tidak hanya aktif memberbarui foto atau status seputar kehidupan yang mereka jalani sehari-hari, tetapi juga menyampaikan pandangan terkait dengan isu-isu aktual yang terjadi di sekitarnya. Isu-isu Pilkada DKi 2017 menjadi isu yang paling dicari dan menjadi perhatian banyakan kalangan. Isu-isu itu tampai melalui Facebook dan Twitter, masyarakat bisa menggalang kekuatan dan opini sendiri untuk menolak kebiiakan pemerintah yang dirasakan benentangan dengan hati nurani masyarakat, dalam hal ini masyarakat mampu menyuarakan suka atau tidak suka terhadap pasangan calon pesera Pilkada DKI 2017. Isu-isu yang selalu terdengan adalah isu penistaan

agama, isu teman ahok, dan banyak isu yang menjadi perhatian menjadikan isu-isu tersebut sebagai trending topik. Semua orang dapat merasakan situasi politik menjelang pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta begitu memanas dan konfliktual. Syakwasangka, intimidasi, apriori menghiasi ruang publik. Arus komunikasi dan diskusi di ruang media sosial terjadi sedemikian keras dan memecah-belah. Terlihat jelas memudarnya penghormatan terhadap lawan bicara, kedewasaan untuk menerima perbedaan pendapat dan empati terhadap masyarakat yang kebingungan dan cemas menghadapi hoax dan fakenews. Jejaring sosial membawa dampak positif terhadap komunikasi masyarakat. Tetapi dibalik itu semua terdapat pula dampak-dampak negatif yang banyak dirasakan oleh para pengguna media sosial.

Dampak negatif tersebut diakibatkan karena masyarakat kurang pandai dalam memilih dan memilah mana yang baik dan yang buruk. Hal ini disebabkan kurang siapnya masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia dalam menghadapi perkembangan teknologi yang berkembang saat ini. Salah satu dampak negatif yang muncul dari semakin maraknya penggunaan media sosial adalah banyaknya muncul berita hoax. Media sosial menjadi salah satu media yang banyak digunakan untuk menyebarkan berita hoax. Media sosial dipandang sebagai media yang mudah diakses dan banyak digunakan masyarakat. Sehingga penyebaran informasi melalui media sosial dapat dengan cepat menyebar dari satu pengguna ke pengguna lain. Maurice yang memiliki asumsi terbaru terkait dengan hubungan antara media baru dengan politik. Salah satu hasil pemikiran lainnya yang ditulis oleh Greg Elmer dalam jurnalnya yang berjudul "*Live research: Twittering an election debate*", berusaha meyakinkan masyarakat bahwa pada masa ini, para pelaku, konsultan hingga peneliti kampanye politik mempunyai tantangan baru dalam mengikuti perkembangan cara berkomunikasi masyarakat. Dalam pemanfaatan aring sosial, banyak para oknum yang tidak bertanggung jawab menyalahgunakan jaringan informasi yang dipublikasikan untuk masyarakat sehingga muncul "Kampanye Hitam" atau "Black Campaigns" dalam kemasan hoax. "*Kampanye Hitam*" atau "*Black Campaigns*" yang belakangan ini melibatkan media sebagai perantara untuk menyampaikan pesan-pesan yang sesungguhnya diluar dari etika politik.

Kecenderungan kampanye hitam dalam kemasan berita hoax berisikan penyampaian hal-hal palsu yang belum terbukti kebenarannya, sehingga maraknya hoax adalah cara para pasangan calon untuk menyampaikan kejelekan lawan politiknya, seperti pada Pilkada DKI 2017.

Perilaku ini mampu menimbulkan konflik sosial secara masih terlihat dari maraknya hoax yang timbulkan menciptakan suatu kondisi tidak kondusif dalam Pilkada DKI 2017, isu-isu yang diangkat dan dikembangkan penuh dengan isu yang negatife dan saling menjatuhkan. Konflik itu terasa seolah pendukung dari masing-masing pasangan calon Pilkada DKI 2017. Konflik yang terjadi pada dekade sekarang lebih beragam lagi. Namun demikian, Hobbes, Khaldun dan Machiavelli berpandangan bahwa keberadaan konflik sosial penting bagi kehidupan manusia dan masyarakatnya. Terjadinya konflik sosial umumnya melalui dua tahap, yaitu dimulai dari tahap keretakan sosial (disorganisasi) yang terus berlanjut ke tahap perpecahan (disintegrasi). Timbulnya gejala-gejala disorganisasi dan disintegrasi. Ketidaksepahaman para anggota kelompok tentang tujuan masyarakat yang pada awalnya menjadi pedoman bersama.

Norma-norma sosial tidak membantu lagi anggota masyarakat dalam mencapai tujuan yang telah disepakati. Kaidah-kaidah dalam kelompok yang dihayati oleh anggotanya bertentangan satu sama lain. Sangsi menjadi lemah bahkan tidak dilaksanakan dengan konsekuen. Tindakan anggota kelompok sudah tidak memperhatikan lagi norma-norma dan bertentangan hal ini terjadi karena berita palsu sudah tidak mempertimbangkan seluruh norma tersebut. Penyebab konflik sangatlah kompleks yang dilatarbelakangi oleh berbagai dimensi dan peristiwa sosial. Konflik yang terjadi dalam masyarakat bisa berlatar belakang ekonomi, politik, kekuasaan, budaya, agama, dan kepentingan lainnya. Menurut DuBois dan Miley, sumber utama terjadinya konflik dalam masyarakat adalah adanya ketidakadilan sosial, diskriminasi terhadap hak-hak individu dan kelompok, dan tidak adanya penghargaan terhadap keberagaman. Salah satu sebab terjadinya konflik ialah karena reaksi yang diberikan oleh dua orang/ kelompok atau lebih dalam situasi yang sama berbeda-beda. Selain itu, konflik mudah terjadi apabila prasangka telah berlangsung lama.

Menurut Gerungan (1966), prasangka social (social prejudice) terjadi karena:

1. Kurangnya pengetahuan dan pengertian tentang hidup pihak lain.
2. Adanya kepentingan perseorangan atau golongan.
3. Ketidakisyafan akan kerugian dari akiabat prasangka.

Dalam sosiologi, konflik merupakan gambaran tentang terjadinya percekcokan, perselisihan, ketegangan atau pertentangan sebagai akibat dari perbedaan-perbedaan yang muncul dalam kehidupan masyarakat, baik perbedaan secara individual maupun perbedaan kelompok. Perbedaan tersebut dapat berupa perbedaan pendapat, pandangan, penafsiran, pemahaman, kepentingan atau perbedaan yang lebih luas dan umum, seperti perbedaan agama, ras, suku bangsa, bahasa, profesi, golongan politik dan kepercayaan. Dalam masyarakat, konflik selalu akan mewarnai fenomena sosial yang terefleksikan sebagai fakta sosial. Fenomena sosial ini terbentuk karena semakin banyak pengguna internet yang menciptakan berbagai fenomena melalui informasi yang berita palsu atau hoax. Konflik sebagai proses sosial akan selalu berlangsung dalam kehidupan bermasyarakat karena masyarakat bersifat dinamis. Dinamika tersebut merupakan jawaban atas tuntutan kehidupan baik secara pribadi maupun kelompok. Hal ini sangat dipengaruhi oleh karakteristik masyarakat yang terdiri atas individu-individu yang diorganisasikan oleh norma dan nilai sosial. Konflik sosial yang ditimbulkan berdasarkan berita palsu atau hoax harus menjadikan konflik sebagai fobia dalam kehidupan. Dalam hal ini, pengembangan pribadi masyarakat harus memiliki sifat partisipasif untuk tidak mudah percaya dalam berbagai informasi yang masuk, karena pengemasan berita palsu selalu dikemas dalam bentuk yang halus dan mengakibatkan seolah serupa dengan berita benar. Artinya, konflik akan selalu terjadi pada diri seseorang dan di dalam masyarakat.

Secara umum, konflik sosial dapat diartikan sebagai pertentangan antar anggota masyarakat yang bersifat menyeluruh dalam kehidupan. Konflik sosial merupakan salah satu bentuk proses sosial yang bersifat disosiatif, konflik sosial akan terjadi akibat dari informasi yang disebarkan oleh media sosial yang merupakan berita palsu atau hoax. Menurut Gerungan (1966), konflik sosial dapat terjadi karena adanya reaksi yang berbeda oleh dua orang/kelompok

dalam situasi yang berbeda. Dalam hal ini setiap kemasan informasi yang diberikan terhadap setiap pasangan calon Pilkada DKI 2017 selalu berisi informasi yang berbeda dan bertentangan bagi beberapa kelompok. Kelompok paslon Agus-Sylvi, Basuki-Djarot, dan Anies-Sandi, dari ketiga perbedaan pandangan masyarakat menilai maka aka nada gesekan rasa suka dan tidak suka terhadap masing-masing paslon dan masing-masing pendukung. Karena, kurangnya pengetahuan dan pengertian tentang hidup dengan pihak lain, adanya kepentingan perseorangan yang dibawa oleh para paslon dan para pendukung paslon, dan kerugian akibat prasangka yang dihasilkan dari berita palsu dan hoax.

Sikap pemerintah dalam fenomena berita hoax dipaparkan dalam beberapa pasal yang siap ditimpakan kepada penyebar hoax tersebut antara lain, KUHP, Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Undang-Undang No.40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Tidak hanya itu, penyebar berita hoax juga dapat dikenakan pasal terkait ujaran kebencian dan yang telah diatur dalam KUHP dan UU lain di luar KUHP. Dari hukum yang dibuat oleh pemerintah, jumlah penyebar hoax semakin besar tidak berbanding lurus dengan jumlah persidangan yang seharusnya juga besar. Dengan masih belum mampu menjerat beberapa pelaku hoax, sangat disayangkan pemerintah hanya melakukan pemblokiran terhadap situs-situs hoax. Sementara si pembuat berita hoax masih dapat terus berproduksi melakukan ancaman dan memperluas ruang gerak. Dalam melawan hoax dan mencegah meluasnya dampak negatif hoax, pemerintah pada dasarnya telah memiliki payung hukum yang memadai. Pasal 28 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang ITE, Pasal 14 dan 15 UU No. 1 tahun 1946, Pasal 311 dan 378 KUHP, serta Undang-Undang No. 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskiriminasi Ras dan Etnis merupakan beberapa produk hukum yang dapat digunakan untuk memerangi penyebaran hoax. Selain produk hukum, pemerintah juga sedang menggulirkan kembali wacana pembentukan Badan Siber Nasional yang dapat menjadi garda terdepan dalam melawan penyebaran informasi yang menyesatkan, selain memanfaatkan program Internetsehat dan Trust+Positif yang selama ini menjalankan fungsi sensor dan pemblokiran situs atau website yang ditengarai memiliki materi

negatif yang bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

Perilaku penyebaran hoax melalui internet sangat dipengaruhi oleh pembuat berita baik itu individu maupun berkelompok, dari yang berpendidikan rendah sampai yang tinggi, dan terstruktur rapi. (Lazonder, Biemans, & Wopereis, 2000) menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara seseorang yang memiliki keahlian khusus dalam menggunakan search engine dengan orang yang masih baru atau awam dalam menggunakan search engine. Mereka dibedakan oleh pengalaman yang dimiliki. Individu yang memiliki pengalaman lebih banyak dalam memanfaatkan search engine, akan cenderung lebih sistematis dalam melakukan penelusuran dibandingkan dengan yang masih minim pengalaman (novice).

Berita hoax semakin sulit dibendung walaupun sampai dengan 2016 pemerintah telah memblokir 700 ribu situs, namun setiap harinya pula berita hoax terus bermunculan. Pada Januari 2017 pemerintah melakukan pemblokiran terhadap 11 situs yang mengandung konten negatif, namun kasus pemblokiran tersebut tidak sampai menyentuh meja hijau. Beberapa kasus di indonesia terkait berita hoax telah memakan korban, salah satunya berita hoax akan penculikan anak yang telah tersebar di beberapa media sosial dan menyebabkan orang semakin waspada terhadap orang asing. Literasi media adalah perspektif yang dapat digunakan ketika berhubungan dengan media agar dapat menginterpretasikan suatu pesan yang disampaikan oleh pembuat berita. Orang cenderung membangun sebuah perspektif melalui struktur pengetahuan yang sudah terkonstruksi dalam kemampuan menggunakan informasi (Pooter, 2011). Juga dalam pengertian lainnya yaitu kemampuan untuk mengevaluasi dan menkomunikasikan informasi dalam berbagai format termasuk tertulis maupun tidak tertulis. Literasi media adalah seperangkat kecakapan yang berguna dalam proses mengakses, menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan pesan dalam beragam bentuk. Literasi media digunakan sebagai model instruksional berbasis eksplorasi sehingga setiap individu dapat dengan lebih kritis menanggapi apa yang mereka lihat, dengar, dan baca.

Penyebaran berita palsu yang marak terjadi ini jika dikaitkan dengan etika pada internet adalah penyalahgunaan freedom of speech. Freedom of speech ini berasal dari negara-negara yang memiliki tradisi

liberal yang menyalahkan apabila seseorang mempunyai batasan dalam mengemukakan pendapat dan memiliki fungsi masing-masing individu pada komunitas dapat mengemukakan pendapat, menyalahkan seseorang, memuji seseorang dll sebebas-bebasnya pada suatu komunitas (Floridi, 2010). Dengan berkembangnya media sosial yang dapat melintasi antar negara atupun benua, masing-masing budaya dan tradisi tidak akan berperan dalam hal pembatasan penyebaran informasi ini. Berawal dari biasnya budaya tersebut, hak *Freedom of Speech* seringkali disalahartikan dan salahgunakan untuk menciptakan berita hoax yang bertujuan memang untuk membuat sensasi pada media sosial tersebut atau memang sengaja agar pengguna internet dapat mampir pada website sang pembuat berita hoax tersebut agar meraup keuntungan dari jumlah pengunjung yang banyak pada websitenya.

Tujuan gerakan internet sehat adalah untuk memberikan pendidikan kepada pengguna internet untuk menganalisis pesan yang disampaikan, mempertimbangkan tujuan komersil dan politik dibalik citra atau pesan di internet dan meneliti siapa yang bertanggungjawab atas pesan yang diimplikasikan itu. Oleh karena itu, agar gerakan internet sehat dapat berjalan secara optimal maka sangat diperlukan pendidikan berinternet salah satunya adalah pendidikan etika berinternet. Pendidikan internet lebih pada pembelajaran tentang etika bermedia internet, bukan pengajaran melalui media. Pendidikan etika bermedia internet bertujuan untuk mengembangkan baik pemahaman kritis maupun partisipasi aktif, sehingga anak muda sebagai konsumen media internet memiliki kemampuan dalam membuat membuat tafsiran dan penilaian berdasarkan informasi yang diperolehnya. Selain itu anak muda mampu menjadi produser media internet dengan caranya sendiri sehingga menjadi partisipan yang berdaya di komunitasnya (Setiawan, 2012).

Semakin besarnya jumlah penguna internet dan dengan mudahnya mendapatkan informasi saat ini menjadikan berita hoax semakin dengan mudah tersebar. Aturan dan pasal untuk menjerat hukuman untuk penyebar hoax belum mampu mengendalikan jumlah jumlah berita hoax yang terus terproduksi setiap waktu. Biasnya budaya-budaya pada negara yang sudah melek internet/media sosial membuat berita

hoax semakin mudah tersebar. Masyarakat perlu dibekali dengan pengetahuan akan internet Sehat dengan Literasi media sehingga dapat mengenali ciri-ciri berita hoax, dan penerima berita dapat mengakses, menganalisis, mengevaluasi, dalam mengambil makna dari suatu berita. Maraknya hoax yang diterima merupakan isu-isu sosial dan politik, melibatkan pemerintah dan masyarakat untuk mengambil sikap dalam menangani permasalahan ini. Hoax yang selalu diterima merupakan bentuk tulisan yang dalam hasil survey menunjukan angka 62,10%, gambar 37,50%, dan video 0,40%. Seluruh berita palsu atau hoax itu muncul melalui saluran sosial media menempati tempat tertinggi dengan persentase sebesar 92,40%, kemudian diikuti dengan saluran aplikasi chating sebesar 62,80%, dan situs web sebesar 34,90% yang masing-masing menempati posisi berurut.

Hasil survey yang telah dilakukan juga mengatakan bahwa berita palsu atau hoax sangat mengganggu, baik memiliki peluang terbesar untuk menciptakan konflik, berita palsu atau hoax juga mampu menghambat sebuah pembangunan nasional, hal ini seperti yang dikatakan oleh Menkopolhukam. Berdasarkan pembahasan dan analisis yang dilakukan oleh penelti, berita palsu atau hoax dapat dihambat atau ditanggulangi dengan cara melakukan edukasi secara menyeluruh kepada masyarakat pengguna internet dan media sosial. Hal ini bukan sesuai dengan hasil survey yang telah dilakukan oleh peneliti mendapatkan nilai persentase sebesar 57,70%. Pada Pilkada DKI 2017, pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama dalam melakukan perlawanan terhadap berita palsu atau hoax yang beredar. Karena tanggung jawab terhadap penyebaran berita palsu atau hoax merupakan tanggun jawab pribadi masing-masing, pemerintah, komunitas, kepolisian, dan pemuka masyarakat. Masyarakat harus lebih dahulu memeriksa kebenarannya terlebih dulu terhadap berita yang diterima mengenai Pilkada DKI 2017. Adapun cara lain yang bisa dilakukan adalah dengan diam atau mengacuhkan berita yang diterima terkait Pilkada DKI 2017. Pemerintah harus bekerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum untuk bersama mempersiapkan regulasi khusus agar berita palsu atau hoax tidak selalu marak pada Pilkada DKI 2017. Regulasi itu juga solusi untuk mencegah timbulnya konflik sosial horisontal secara masif. Sehingga sistem dengan alur kerja sama yang dilakukan

oleh pemerintah dan masyarakat terhadap berita palsu atau hoax ketika telah dibuatnya regulasi yang kuat, pemerintah segera menyelenggarakan edukasi khusus terhadap masyarakat secara menyeluruh untuk menggunakan sosial media dan membuat berita, hal ini dinilai baik oleh peneliti melihat dari hasil analisis dan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti berdasarkan hasil survey menempatkan regulasi adalah langkah yang perlu disikapi oleh pemerintah terkait penggunaan ITE dan menghentikan maraknya berita palsu atau hoax yang beredar mengenai Pilkada DKI 2017, dan masyarakat perlu mendapatkan edukasi khusus untuk lebih bijak dan dewasa dalam membuat berita dan mengkonsumsi berita palsu atau hoax sehingga tidak merubah opini dan menciptakan konflik sosial. Hal ini melihat konflik sosial mampu terjadi akibat isu-isu SARA, sosial dan politik.

Berita palsu atau hoax yang selalu dilakukan saat Pilkada DKI 2017 merupakan isu-isu sosial politik dan SARA, sehingga isu-isu itu adalah isu teratas yang berpotensi besar menimbulkan konflik. Hal ini menempatkan bahwa hoax telah menjadi permasalahan nasional dan dampak buruk sudah dirasakan oleh bangsa ini. Hoax telah menjadi momok nasional yang harus diperangi bersama, karena dampak yang ditimbulkan begitu masif dan sangat merugikan banyak pihak, baik itu secara reputasi, materi, hingga mengancam nyawa. Berita palsu atau hoax , apalagi fitnah memang sangat berbahaya dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Berita palsu atau hoax dalam Pilkada DKI 2017 tersebut sangat berpotensi memunculkan konflik horizontal di masyarakat. Dan, hal itu akan memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Sehingga bisa dikatakan segala bentuk berita palsu atau hoax mampu mengancam keamanan nasional karena dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Peran media dam komunikasi massa disamping sebagai sumber daya untuk menggerakkan modernisasi pada sebagaian masyarakat, pemerintah dalam bidang politik kekuatan media komunikasi merupakan kekuatan untuk menegakkan persatuan nasional.

Kesimpulan dan Saran

Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta 2017 memiliki posisi yang strategis sehingga penggunaan kemampuan media sosial sebagai sarana dalam komunikasi massa sangat dihandalkan. Penyebab Pilkada

DKI Jakarta menjadi sorotan publik adalah persaingan dimana salah satu pasangan calon menjadi terduga kasus penistaan agama yang pada akhirnya para pemilih menjadi terbentuk menjadi golongan - golongan tertentu. Persaingan antara pendukung masing-masing Paslon membuat banyaknya berita hoax yang hadir dan menghiasi pemilihan Gurbernur dan wakil Gurbernur. Penggunaan media sosial dalam Pilkada DKI 2017 tidak luput dari rekayasa atau simulacra, berita palsu atau hoax dipakai sebagai bahan kampanye dan alat propaganda para kandidat dengan kemasan yang sangat halus dan seolah benar. Internet, media online, dan media sosial mempermudah masuknya kepentingan politik dalam media, yang desainnya sesuai dengan kebutuhan kelompok tertentu. Motif dari pembuatan situs penyebar berita hoax tersebut tidak lain karena urusan uang, penyebaran berita hoax di internet sudah menjadi komoditas. Bisnis situs berita hoax dianggap menguntungkan dan tak perlu modal serta biaya operasional besar sehingga menarik minat banyak orang.

Konten berita hoax dirasa menjadi salah satu kebiasaan yang dapat merugikan bagi para pengguna media sosial, khususnya berdampak kepada pengguna media sosial yang awam terhadap pemberitaan yang belum pasti terbukti kebenarannya. Berita palsu atau Hoax bisa berdampak secara berkepanjangan apabila konten tersebut bertahan dalam kurun waktu yang lama dan tidak cepat ditangani secara cermat, cepat dan tepat. Pemberitaan palsu dalam kampanye Pilkada DKI 2017 yang disebarklan melalui media sosial menjadi semacam bola liar yang sulit dikendalikan dan cenderung provokatif serta mengesampingkan etika dalam pemberitaan. Penyebaran berita palsu dan hoax dapat mempengaruhi sifat seseorang, semakin banyak berita hoax akan memperluas pengetahuan seseorang terutama tentang informasi yang belum tentu benar. Jejaring sosial dan media sosial dalam proses Pilkada DKI 2017 sering disalah gunakan oleh beberapa oknum sehingga perubahan opini publik berpotensi besar dalam terciptanya konflik yang diangkat. Merebaknya kabar bohong atau hoax dikhawatirkan banyak pihak akan berdampak destruktif terhadap masyarakat. Selain membodohi, hoax dapat memicu konflik-konflik sosial baru dan dapat mengganggu intergritas kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkoinfokom menegaskan,

untuk menangkal hoax yang beredar di kalangan masyarakat, diperlukan peranan pers untuk menyajikan informasi sesuai fakta yang sebenarnya. Pers harus lebih cermat dan berperan mengurangi berita bohong (www.beritasatu.com). Hoax menimbulkan gejolak sosial dan bentrok horizontal. Pers, sebagai pilar keempat demokrasi, memiliki pengaruh yang sangat besar. Walaupun sudah muncul media sosial, namun kepercayaan dan pengaruh pers sebagai arus utama informasi. Karenanya dalam perkembangan seperti sekarang justru profesionalisme pers semakin dibutuhkan. Pemerintah dan masyarakat memiliki awareness digital yang sama terhadap berita palsu dan hoax, dengan meningkatan literasi masyarakat melalui peran serta pemerintah. Menghilangkan faktor stimulan yang didominasi oleh isu-isu sosial politik dan SARA. Mempermudah akses ke sumber-sumber referensi untuk mencari kebenaran berita.

Masyarakat diharapkan memeriksa kebenaran segala bentuk informasi yang diterima dari berbagai media sosial. Cara memeriksa berita palsu atau hoax adalah, cari segala referensi terkait berita yang didapatkan dari internet, atau *search engine.* Menanyakan kepada orang-orang yang dianggap mengetahui kebenaran berita dan melalui media massa atau media cetak, seperti: Koran, TV, dan Radio, dan Media sosial. Hoax bukan saja terjadi di Indonesia, sehingga pemerintah juga perlu mengadopsi berbagai cara dari pemerintahanan di negara lain yang juga keamanan nasionalnya terancam, akibat saluran komunikasi massa yang digunakan secara tidak bertanggungjawab. Adanya kerja sama antara Pemerintah dengan Komisi Pemilihan Umum dalam pembuatan regulasi terhadap berita palsu atau hoax, khususnya dalam penyelenggaraan Pilkada.

Daftar Pustaka

Asfar , Adib Muttaqin, Semua Mengaku Korban, Anies-Sandiaga Pun Bikin Satgas Anti-Hoax, http://www.solopos.com/2017/03/27/semua-mengaku-korban-anies-sandiaga-pun-bikin-satgas-anti-hoax-805135

Franciska, Christine, Ahok atau bukan Ahok? Media sosial 'kunci' kemenangan di Pilkada Jakarta, http://www.bbc.com/indonesia/majalah/2016/03/160314_ trensosial_ ahok_kampanye_twitter

Gamble, Michael W dan Teri Kwal Gamble, 1986. Introducing Mass Communication, New York: McGraw-Hill

Iskandar, 2017 Jelang Pilkada, Mengapa Orang Indonesia Doyan Konsumsi Hoax?

http://tekno.liputan6.com/read/2850600/jelang-pilkada-mengapa-orang-indonesia-doyan-konsumsi-hoax

Liliweri, Alo, 2005. Prasangka dan Konflik: Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur, Jogjakarta: LKiS Pelangi Aksara

Mulyana,Deddy, 2014. Metode Penelitian Kualitatif Paradigma baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial, Bandung: Remadja Rosdakarya

Nurudin, 2015. Pengantar Komunikasi Massa, Jakarta: Raja Grafindo

Omand,David. 2010, Securing The State. United Kingdom: C. Hurst & Co. Publisher Ltd

Philip N. Howard, Muzammil M. Hussain , 2013. Democracy's Fourth Wave?: Digital Media and the Arab Spring, New York: Oxford University Press

Purhantara, Wahyu, 2010. Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis, Jogjakarta: Graha Ilmu

Purnama, Basuki Eka, Perang Digital Warnai Pilkada DKI Jakarta 2017, http://mediaindonesia.com/news/read/70627/perang-digital-warnai-pilkada-dki-jakarta-2017/2016-10-06#

Praditya, Yosua. 2016, Keamanan Indonesia, Jogjakarta: Nadi Pustaka

Pratama, Aulia Bintang dan Taylor, Gloria Safira, Perang' Kandidat Pilkada Jakarta di Media Sosial, http://www.cnnindonesia.com/kursipanasdki1/20161116223321-522-173144/perang-kandidat-pilkada-jakarta-di-media-sosial/

Pruitt, G, dan Rubin, J. 2004. Teori Konflik Sosial (Seri Psikologi Sosial), Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Redaksi NU, 2017 ,Ahok dan Kampanye SARA di Pilkada Jakarta, http://www.nu.or.id/post/read/71447/ahok-dan-kampanye-sara-di-pilkada-jakarta

Redaksi kompasiana, 2017 , Tiga Info Hoax dan Empat Celah Kecurangan Pemilu yang Harus Diwaspadai Ketiga Paslon Cagub DKI, http://www.kompasiana.com/gatotswandito/tiga-info-hoax-dan-empat-celah-kecurangan-pemilu-yang-harus-diwaspadai-ketiga-paslon-cagub-dki_58968a989593732f465bc083

Setiawan, A. B. (2012). Penanggulangan Dampak Negatif Akses Internet Di Pondok Pesantren Melalui Program Internet Sehat Overcoming Negative Impact of Internet Access in Pondok Pesantren Through Healhty Internet Program

Soeharto, Bambang W, 2013. Menagani konflik di Indonesia, Jakarta: Kata Hasta Pustaka

Sholihuddin, M. (n.d.). Pengaruh Kompetisi Individu (Individual Competence) Terhadap Literasi Media Internet Di Kalangan Santri. Unair.

Tan, Alexis S, 1981. Mass Communication Theories and Research, Columbus: Grid Publishing.